



ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DESA PURWOMARTANI DAN SELOMARTANI DI KABUPATEN SLEMAN

Hanantyo Sri Nugroho¹, Agustina Rahmawati²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia
hanantyo@amikom.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia
agustinarahmawati@amikom.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola keuangan pemerintah desa. Permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan desa telah memiliki ruang yang lebih dari adanya kebijakan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Setidaknya terdapat perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut yakni penganggaran transformatif. Oleh karena itu, perspektif ini memunculkan konsekuensi pada penggunaan teori manajemen strategik. Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pada metode kualitatif deskriptif, faktor yang harus diperhatikan adalah validitas data dimana penelitian ini menggunakan model triangulasi data. Adapun, penelitian ini dilakukan pada beberapa desa di Kabupaten Sleman, yakni Pemerintah Desa Purwomartani dan Pemerintah Desa Selomartani. Hasil penelitian ini adalah terdapat kemampuan adaptif pemerintah desa dalam melakukan tata kelola keuangan pemerintah desa

Kata kunci: Manajemen strategik, Tata kelola keuangan desa, Kabupaten Sleman, Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa)

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait dengan pemanfaatan sumber daya keuangan pada desa menarik untuk dikaji karena terdapat ruang anggaran yang besar sebagai konsekuensi dari undang-

undang desa. Hal tersebut dapat menjadi hambatan maupun tantangan bagi pemerintah desa. Pada perkembangannya, dinamika tata kelola pemerintah desa dihadapkan pada penugasan teknis administrasi sebagai konsekuensi dari bagian pada

supra-sistem pemerintahan yang ada. Selain itu, pemerintah desa juga tetap dihadapkan dengan dinamika penyediaan layanan kepada masyarakat.

Pada perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan inovasi pada sistem tata kelola keuangan yang ada. Keinginan tersebut kemudian dikolabirasikan dengan pihak ketiga. Kolaborasi tersebut memunculkan perubahan aplikasi tersebut yakni Sistem Keuangan Desa (Sikudes) menjadi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Perubahan ini bertujuan agar membantu mempermudah pemerintah desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Perbedaan yang muncul dari transformasi aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) adalah memunculkan konsekuensi pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah desa terjadi pada proses dalam jaringan, dimana sebelumnya pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikudes) masih dapat melalui proses luar jaringan. Selanjutnya, telah terdapat acuan harga pada setiap pengadaan barang dan jasa. Artinya, terdapat perbaikan pada sisi kelemahan yang ada pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikudes), dimana sebelumnya konsep belanja modal dan belanja barang yang ada masih belum jelas.

Pengelolaan keuangan desa di Pemerintahan Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh kepala urusan keuangan. Kepala urusan keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan desa. Artinya, penatausahaan dan kebendaharaan keuangan desa. Nantinya, kepala urusan keuangan pemerintah desa tersebut melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan kepada kepala desa setiap akhir bulan. Lebih lanjut, kepala urusan keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, kantor/lembaga yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan.

Pada mekanisme dana desa, pemerintah daerah menyalurkan dana desa kepada desa setiap tahun anggaran. Dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan pada alokasi dasar, alokasi afirmasi, serta alokasi formula. Alokasi dasar adalah alokasi yang berdasarkan pada jumlah desa, serta besarnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun, besaran jumlah alokasi dasar Kabupaten Sleman pada tahun

2019 adalah 57.828.239, dimana besar alokasi dasar per desa 2019 adalah 672.421. Lebih lanjut, alokasi afirmasi desa diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Pada alokasi desa tertinggal dihitung dengan formulasi satu kali alokasi afirmasi per desa, sedangkan pada alokasi desa sangat tertinggal dihitung dua kali alokasi afirmasi per desa. Penetapan status desa tertinggal ataupun desa sangat tertinggal merupakan penetapan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada perkembangannya, Kabupaten Sleman pada tahun 2019 tidak menerima alokasi afirmasi dari pemerintah pusat. Adapun, alokasi formula pada Kabupaten Sleman sebesar 41.206.937. Selanjutnya, alokasi formula merupakan alokasi yang didapatkan berdasarkan perhitungan yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dengan demikian, menarik untuk menganalisis terkait dengan tata kelola keuangan pada pemerintah desa. Hal ini tentunya melihat bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola keuangan saat ini. Lebih lanjut, state of the art penelitian ini adalah kapasitas

birokrasi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan memadai, sehingga strategi dan kebijakan tata kelola keuangan dapat melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui elemen keberhasilan, hambatan dan tantangan kebijakan ataupun program tata kelola keuangan yang dilakukan oleh masing-masing desa tersebut.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan analisis lingkungan, yakni lingkungan internal dan eksternal. Mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal adalah sebuah bagian penting dari perencanaan strategis yang pada gilirannya dianggap sebagai komponen utama dari proses berkelanjutan (Ghorbani et al., 2015). Analisis lingkungan memiliki peran strategis dalam perumusan dan pemilihan strategis (Reihanian et al., 2012). Selanjutnya, lingkungan internal melihat kepada kekuatan dan kelemahan dari kapasitas organisasi, sedangkan lingkungan eksternal melihat kepada lingkungan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan yang ada (Harfst et al., 2010). Lebih lanjut, pentingnya peningkatan kapasitas daerah agar dapat menemukan yang tepat dan menghubungkan dengan pendekatan pembangunan baru (Harfst & Wirtha, 2011). Adapun, permasalahan dana desa merupakan suatu permasalahan

yang telah banyak diteliti. Beberapa sudut pandang yang digunakan adalah terkait dengan aspek *money, material, man, machine, dan methods*. Masing-masing penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa temuan maupun persamaan atau perbedaan antara hasil penelitian yang ada. Temuan-temuan

tersebut bisa bersifat saling melengkapi (*supplementary*), ataupun saling memberikan perlawanan argumentasi atas penelitian yang telah ada sebelumnya. Pada tabel 1 terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kebijakan tata kelola keuangan pemerintah desa pasca undang-undang dana desa.

Tabel 1. Literature Review
 Penelitian kebijakan tata kelola keuangan pemerintah desa pasca undang-undang dana desa

No	Judul Penelitian	Temuan	Perbedaan Penelitian
1	Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Abidin, 2015)	Penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten	Kapasitas birokrasi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan memadai, yakni Pemerintah Desa Selomartani dan Pemerintah Desa Purwomartani
2	Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi (Prasetyo & Muis, 2015)	Kompetensi kepala desa dan pendamping desa menjadi dua faktor kunci krusial dari sisi SDM yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa	Kapasitas birokrasi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan memadai berasal dari strategi pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dan memiliki strategi pengembangan yang jelas
3	Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (Aziz, 2016)	Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan	Kapasitas birokrasi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan memadai

		kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa	terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta penggunaan keuangan desa
4	Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi Electronic Village Budgeting (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi) (Pratiwi, 2016)	Pada awalnya pengelolaan keuangan desa dilakukan secaramanualkini menjadi berbasisonline melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.	Meskipun menggunakan sistem tata keuangan berbasis online, pemerintah desa tetap melibatkan partisipasi masyarakat

METODE PENELITIAN

Sasaran Penelitian ini adalah implementasi kebijakan tata kelola keuangan pemerintah desa di Kabupaten Sleman, yakni Pemerintah Desa Purwomartani dan Pemerintah Desa Selomartani. Artinya, yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Desa Purwomartani dan Pemerintah Desa Selomartani. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Adapun, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemetaan permasalahan, teori dan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa. Hal

tersebut bertujuan untuk mencari referensi yang berkaitan. Artinya, tahapan ini menyumbangkan bagi tahapan selanjutnya agar pengkajian dapat dilakukan secara mendalam dan fokus pada perumusan masalah dalam penelitian ini. Pada pengumpulan data, penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui penyilangan berbagai sumber data yang berasal dari studi literatur, observasi dan wawancara. Selanjutnya, proses penyilangan data tersebut dilakukan reduksi data. Dengan demikian, proses analisis pada penelitian ini dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan mendapatkan pengertian secara mendalam, komprehensif, dan rinci sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai hasil pemahaman peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kapasitas birokrasi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan memadai, sehingga strategi dan kebijakan tata kelola keuangan dapat melindungi kepentingan publik. Pada kapasitas aparatur pemerintah desa, pemerintah desa di Kabupaten Sleman telah membuat keputusan dan tindakan terkait dengan hambatan pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal yang dilakukan adalah memperluas jaringan dengan memanfaatkan media sosial. Tentunya, hal tersebut bertujuan untuk membantu apabila ada pertanyaan ataupun ketidakpahaman. Hal ini menjadi konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa pada saat disepakatinya penggunaan sistem tata kelola keuangan berupa Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Artinya, pemerintah desa dalam hal ini aparatur desa kemudian menentukan dan membagi tugas terkait dengan kewenangan dalam mewakili tata kelola keuangan. Pada saat ini, wewenang tata kelola keuangan berada pada kepala urusan keuangan, dimana dikoordinasikan dengan kepala urusan perencanaan. Artinya, pembagian wewenang tersebut

berdasarkan kepada tugas yang melekat pada jabatan struktural yang ada. Dengan demikian, pembagian wewenang tersebut yang menjadi kesepakatan awal pada pemerintah desa dan juga menjadi mandat yang melekat pada jabatan struktural yang ada.

Pada analisis lingkungan, pemerintah desa didukung dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada. Dukungan lingkungan internal yang ada berupa sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang ada pada desa di Kabupaten Sleman memudahkan pelaksanaan tata kelola keuangan melalui program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Selanjutnya, dukungan lingkungan internal juga didukung dengan adanya kemampuan aparatur dan sumber daya keuangan yang dapat membuat kapasitas pemerintah desa berjalan secara optimal. Lebih lanjut pada dukungan eksternal, terdapat media komunikasi yang memudahkan aparatur pemerintah desa untuk saling berbagi pengetahuan dan juga solusi terhadap permasalahan yang ada. Adapun, kelemahan yang muncul adalah terkait dengan dapat bertumpuknya akun pada saat melakukan pengisian sehingga data yang sudah diinputkan dapat berganti, serta terkait dengan posisi pihak ketiga. Hal tersebut membuat munculnya hambatan jika muncul

keinginan untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya, pada implementasi tata kelola keuangan melalui sistem Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa), Pemerintah Desa Selomartani masih mengalami permasalahan. Hal tersebut dikarenakan terlalu singkat waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal tersebut dirasakan berbeda dengan waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Keuangan Desa (Sikudes), dimana berlangsung 6-12 bulan. Tentunya, hal tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penggunaan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dalam tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan isu strategis yakni terkait dengan kebutuhan akan pelatihan atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa), serta penyedia aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dapat diubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya identifikasi permasalahan startegik yang dihadapi oleh pemerintah desa. Artinya, munculnya isu strategis

berdasarkan pada pengembangan evaluasi dan alternatif strategi yang tersedia.

1. Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Purwomartani

Visi Pemerintah Desa Purwomartani adalah terwujudnya masyarakat purwomartani di tahun 2020 yang mandiri dan tangguh berbasis pada usaha pertanian dan jasa menuju masyarakat yang makmur sejahtera, aman dan damai. Adapun, visi adalah suatu gambaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Pada penyusunan visi Desa Purwomartani ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Purwomartani antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Artinya, visi tersebut dapat terjelaskan menjadi beberapa hal yakni 1) masyarakat yang mandiri dan tangguh adalah kondisi masyarakat yang ingin mewujudkan kebutuhannya secara mandiri dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki tanpa ketergantungan fihak lain dan berperan aktif dalam pembangunan, mempunyai jiwa yang tangguh pantang menyerah didalam menggapai cita-citanya.

2) berbasis pada usaha Pertanian dan Jasa adalah bahwa lahan pertanian, perikanan dan usaha peternakan merupakan potensi yang perlu dikelola untuk ditingkatkan produksi dan produktivitasnya serta dimbangi usaha konservasi alam, sedangkan sektor jasa juga mempunyai prospek lebih baik kedepan hal ini terkait dengan perkembangan pariwisata, industri dan pendidikan sehingga sektor jasa akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 3) menuju masyarakat sejahtera, aman dan damai adalah merupakan kebutuhan yang di cita-citakan oleh seluruh masyarakat purwomartani yaitu sejahtera lahir dan batin dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi guyub rukun tata titi tenteram karta raharja. 4) visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat desa Purwomartani yang terdiri dari perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kedepan. Oleh karena itu, untuk pencapaian visi maka dirumuskan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,

meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pada implementasi tata kelola keuangan melalui sistem Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa), Pemerintah Desa Purwomartani masih mengalami permasalahan. Hal tersebut dikarenakan terlalu singkat waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal tersebut dirasakan berbeda dengan waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Keuangan Desa (Sikudes), dimana berlangsung 6-12 bulan. Tentunya, hal tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penggunaan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dalam tata kelola keuangan desa.

Pada kapasitas aparatur pemerintah desa, Pemerintah Desa Purwomartani membuat keputusan dan tindakan terkait dengan hambatan pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal yang dilakukan adalah memperluas jaringan dengan memanfaatkan media sosial. Tentunya, hal tersebut bertujuan untuk membantu apabila ada

pertanyaan ataupun ketidakpahaman. Hal ini menjadi konsekuensi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Purwomartani pada saat disepakatinya penggunaan sistem tata kelola keuangan berupa Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Artinya, Pemerintah Desa Purwomartani dalam hal ini aparaturnya kemudian menentukan dan membagi tugas terkait dengan kewenangan dalam mewakili tata kelola keuangan. Pada saat ini, wewenang tata kelola keuangan berada pada kepala urusan keuangan, dimana dibantu oleh kepala urusan perencanaan. Artinya, pembagian wewenang tersebut berdasarkan kepada tugas yang melekat pada jabatan struktural yang ada. Dengan demikian, pembagian wewenang tersebut yang menjadi kesepakatan awal pada Pemerintah Desa Purwomartani dan juga menjadi mandat yang melekat pada jabatan struktural yang ada.

Pada analisis lingkungan, Pemerintah Desa Purwomartani didukung dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada. Dukungan lingkungan internal yang ada berupa sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang ada pada Desa Purwomartani memudahkan pelaksanaan tata kelola keuangan melalui program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Selanjutnya, dukungan

lingkungan internal juga didukung dengan adanya kemampuan aparaturnya dan sumber daya keuangan yang dapat membuat kapasitas Pemerintah Desa Purwomartani berjalan secara optimal. Lebih lanjut pada dukungan eksternal, terdapat media komunikasi yang memudahkan aparaturnya Pemerintah Desa Purwomartani untuk saling berbagi pengetahuan dan juga solusi terhadap permasalahan yang ada. Adapun, kelemahan yang muncul adalah terkait dengan posisi pihak ketiga. Hal tersebut membuat munculnya hambatan jika muncul keinginan untuk melakukan konsultasi.

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan isu strategis yakni terkait dengan kebutuhan akan pelatihan dan juga penyedia aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dapat diubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya identifikasi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Purwomartani. Artinya, munculnya isu strategis berdasarkan pada pengembangan evaluasi dan alternatif strategi yang tersedia.

2. Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Selomartani

Visi Pemerintah Desa Selomartani adalah terwujudnyamasyarakat selomartani yang agamis, sejahtera, berbudaya danmandiri dengan ketahanan pangan pada tahun 2021. Adapun, visi adalah suatu gambaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Pada penyusunan visi Desa Selomartani ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Selomartani antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Oleh karena itu, untuk pencapaian visi maka dirumuskan dengan meningkatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakatdalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melaluipeningkatan kualitas birokrasi atau sumber daya manusia dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, memelihara dan melestarikan kesenian dan kebudayaan yang adadi Desa Selomartani agar tetap lestari dan berkembang, meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan

kemiskinan, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana danpemanfaatan lahan pekarangan serta sumber daya alam.

Pada implementasi tata kelola keuangan melalui sistem Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa), Pemerintah Desa Selomartani masih mengalami permasalahan. Hal tersebut dikarenakan terlalu singkat waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal tersebut dirasakan berbeda dengan waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Keuangan Desa (Sikudes), dimana berlangsung 6-12 bulan. Tentunya, hal tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penggunaan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dalam tata kelola keuangan desa.

Pada kapasitas aparatur pemerintah desa, Pemerintah Desa Selomartani membuat keputusan dan tindakan terkait dengan hambatan pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal yang dilakukan adalah memperluas jaringan dengan memanfaatkan

media sosial. Tentunya, hal tersebut bertujuan untuk membantu apabila ada pertanyaan ataupun ketidakpahaman. Hal ini menjadi konsekuensi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Selomartani pada saat disepakatinya penggunaan sistem tata kelola keuangan berupa Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Artinya, Pemerintah Desa Selomartani dalam hal ini aparat desa kemudian menentukan dan membagi tugas terkait dengan kewenangan dalam mewakili tata kelola keuangan. Pada saat ini, wewenang tata kelola keuangan berada pada kepala urusan keuangan, dimana dibantu oleh kepala urusan perencanaan. Artinya, pembagian wewenang tersebut berdasarkan kepada tugas yang melekat pada jabatan struktural yang ada. Dengan demikian, pembagian wewenang tersebut yang menjadi kesepakatan awal pada Pemerintah Desa Selomartani dan juga menjadi mandat yang melekat pada jabatan struktural yang ada.

Pada analisis lingkungan, Pemerintah Desa Selomartani didukung dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada. Dukungan lingkungan internal yang ada berupa sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang ada pada Desa Selomartani memudahkan pelaksanaan tata kelola keuangan melalui program

Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Selanjutnya, dukungan lingkungan internal juga didukung dengan adanya kemampuan aparat dan sumber daya keuangan yang dapat membuat kapasitas Pemerintah Desa Selomartani berjalan secara optimal. Lebih lanjut pada dukungan eksternal, terdapat media komunikasi yang memudahkan aparat Pemerintah Desa Selomartani untuk saling berbagi pengetahuan dan juga solusi terhadap permasalahan yang ada. Adapun, kelemahan yang muncul adalah terkait dengan dapat bertumpuknya akun pada saat melakukan pengisian sehingga data yang sudah diinputkan dapat berganti.

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan isu strategis yakni terkait dengan kebutuhan akan pelatihan dan juga penyedia aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dapat diubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya identifikasi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Selomartani. Artinya, munculnya isu strategis berdasarkan pada pengembangan evaluasi dan alternatif strategi yang tersedia.

PENUTUP

Kapasitas birokrasi pemerintah desa dalam tata kelola keuangan memadai, sehingga strategi dan kebijakan tata kelola keuangan dapat melindungi kepentingan publik. Pada kapasitas aparatur pemerintah desa, pemerintah desa di Kabupaten Sleman telah membuat keputusan dan tindakan terkait dengan hambatan pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal yang dilakukan adalah memperluas jaringan dengan memanfaatkan media sosial. Tentunya, hal tersebut bertujuan untuk membantu apabila ada pertanyaan ataupun ketidakpahaman. Hal ini menjadi konsekuensi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa pada saat disepakatinya penggunaan sistem tata kelola keuangan berupa Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Artinya, pemerintah desa dalam hal ini aparatur desa kemudian menentukan dan membagi tugas terkait dengan kewenangan dalam mewakili tata kelola keuangan. Pada saat ini, wewenang tata kelola keuangan berada pada kepala urusan keuangan, dimana dikoordinasikan dengan kepala urusan perencanaan. Artinya, pembagian wewenang tersebut berdasarkan kepada tugas yang melekat pada jabatan struktural yang ada. Dengan demikian,

pembagian wewenang tersebut yang menjadi kesepakatan awal pada pemerintah desa dan juga menjadi mandat yang melekat pada jabatan struktural yang ada.

Pada analisis lingkungan, pemerintah desa didukung dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada. Dukungan lingkungan internal yang ada berupa sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang ada pada desa di Kabupaten Sleman memudahkan pelaksanaan tata kelola keuangan melalui program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Selanjutnya, dukungan lingkungan internal juga didukung dengan adanya kemampuan aparatur dan sumber daya keuangan yang dapat membuat kapasitas pemerintah desa berjalan secara optimal. Lebih lanjut pada dukungan eksternal, terdapat media komunikasi yang memudahkan aparatur pemerintah desa untuk saling berbagi pengetahuan dan juga solusi terhadap permasalahan yang ada. Adapun, kelemahan yang muncul adalah terkait dengan dapat bertumpuknya akun pada saat melakukan pengisian sehingga data yang sudah diinputkan dapat berganti, serta terkait dengan posisi pihak ketiga. Hal tersebut membuat munculnya hambatan jika muncul keinginan untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya, pada implementasi tata kelola

keuangan melalui sistem Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa), Pemerintah Desa Selomartani masih mengalami permasalahan. Hal tersebut dikarenakan terlalu singkat waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa). Hal tersebut dirasakan berbeda dengan waktu yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan program Sistem Keuangan Desa (Sikudes), dimana berlangsung 6-12 bulan. Tentunya, hal tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penggunaan program Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dalam tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan isu strategis yakni terkait dengan kebutuhan akan pelatihan atas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa), serta penyedia aplikasi Sistem Informasi Debet Kredit untuk Desa (Sidek Desa) dapat diubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya identifikasi permasalahan startegik yang dihadapi oleh pemerintah desa. Dengan demikian, munculnya isu strategis berdasarkan pada pengembangan evaluasi dan alternatif strategi yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiaani, P., & Azadi, H. (2015). Ecotourism sustainable development strategies using SWOT and QSPM model: A case study of Kaji Namakzar Wetland, South Khorasan Province, Iran. *Tourism Management Perspectives*, 16, 290-297. <https://doi.org/10.1016/j.tm.p.2015.09.005>
- Harfst, J., Wirth, P., Lintz, G., & Bieberstein, C. (2010). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of European mining regions (SWOT Report I). Germany, Dresden: Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER), 103. [http://refhub.elsevier.com/S2211-9736\(15\)30005-2/rf0100](http://refhub.elsevier.com/S2211-9736(15)30005-2/rf0100)
- Harfst, J., & Wirtha, P. (2011). Structural change in former mining regions: Problems, potentials and capacities in

- multi-level-governance systems. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 14, 167-176.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.033>
- Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
<https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>
- Pratiwi, R. N. (2016). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Manajemen Keuangan Desa Melalui Inovasi Electronic Village Budgeting*. 2(3), 123-130.
- Reihanian, A., Mahmood, N. Z. B., Kahrom, E., & Hin, T. W. (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. *Tourism Management Perspectives*, 4, 223-228.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.005>